

# PERANCANGAN ULANG INTERIOR KANTOR BAPPEDA KOTA SUKABUMI DENGAN PENDEKATAN AKTIVITAS

Nadine Putri Azzahra<sup>1</sup>, Titihan Sarihati<sup>2</sup> dan Teddy Ageng Maulana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> *Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom, Jl. Telekomunikasi No 1, Terusan Buah Batu – Bojongsoang, Sukapura, Kec. Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40257*  
[nadineputriaz@student.telkomuniversity.ac.id](mailto:nadineputriaz@student.telkomuniversity.ac.id), [titihansarihati@telkomuniversity.ac.id](mailto:titihansarihati@telkomuniversity.ac.id),  
[teddym@telkomuniversity.ac.id](mailto:teddym@telkomuniversity.ac.id)

**Abstrak:** Penyusunan rencana pembangunan di tingkat kota dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Unsur pembangunan mencakup sosial, ekonomi dan politik, hingga adanya penyesuaian dengan konservasi lingkungan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didukung dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) oleh PBB untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan di tingkat global. Pemerintah Indonesia menjadikan SDGs sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah melaksanakan SDGs secara mandiri berdasarkan kapasitasnya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Namun berdasarkan *Scorecard* pencapaian indikator pada *Kesiapan SDGs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, Kota Sukabumi menghadapi beberapa tantangan untuk mencapai SDGs tahun 2030. Penguatan fondasi kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif serta peningkatan kualitas ASN berkontribusi besar sebagai pendorong pencapaian indikator SDGs lainnya. Dalam hal ini, produktivitas pegawai pemerintah dan tata ruang kantor yang baik perlu ditingkatkan. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan beberapa permasalahan dalam lingkup interior yang menghambat kenyamanan dan aktivitas para pegawai. Maka dari itu, diperlukannya perancangan ulang pada interior Kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan menggunakan pendekatan aktivitas.

**Kata Kunci:** SDGs, produktivitas, Bappeda Sukabumi, aktivitas

**Abstract:** *The preparation of development plans at the city level is carried out by the Regional Development Planning Agency (Bappeda). Development elements include social, economic and political, as well as adjustments to environmental conservation to encourage sustainable development. Sustainable development is supported by the establishment of Sustainable Development Goals (SDGs) by the UN to achieve sustainable development at the global level. The Indonesian government has made SDGs one of its national development priorities, with the issuance of Presidential Regulation (Perpres) Number 59 of 2017. Until now, regional governments have implemented SDGs independently based on their capacity. One of them is the Sukabumi City Government. However, based on the Scorecard for achieving indicators on District/City SDG Readiness*

*in West Java Province, Sukabumi City faces several challenges to achieve SDGs in 2030. Strengthening institutional foundations that are appropriately functional and collaborative as well as improving the quality of ASN contribute greatly as a driver for achieving other SDGs indicators. In this case, the productivity of government employees and good office layout need to be improved. Based on field observations, several problems were found in the interior area which hampered the comfort and activities of employees. Therefore, it is necessary to redesign the interior of the Sukabumi City Bappeda Office using an activity approach.*

**Keywords:** SDGs, productivity, Bappeda Sukabumi, activity

## **PENDAHULUAN**

Kantor Bappeda Kota Sukabumi merupakan kantor pemerintah daerah yang bergerak di bidang perencanaan dan pembangunan. Bappeda (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan di tingkat Kota/Kabupaten. Aspek pembangunan mencakup ekonomi, sosial, politik, hingga adanya pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan didukung oleh PBB dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs merupakan serangkaian 17 tujuan yang ditentukan dan ditetapkan oleh PBB untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat global.

Pemerintah Indonesia menjadikan SDGs sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, dengan dikeluarkannya Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hingga saat ini, pemerintah daerah telah melaksanakan SDGs secara mandiri berdasarkan kapasitasnya. Salah satunya adalah Pemerintah Kota Sukabumi. Ditinjau dalam *Scorecard* pencapaian indikator pada *Kesiapan SDGs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*, Kota Sukabumi hasilnya masih dibawah rata-rata. Indikator penilaian yang nilainya belum mencapai rata-rata diantaranya perekonomian dan ketimpangan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, serta digitalisasi dan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas) menyampaikan bahwa dengan adanya penguatan fondasi kelembagaan yang tepat fungsi dan kolaboratif serta peningkatan kualitas ASN berkontribusi besar dalam mendorong pencapaian indikator SDGs lainnya. Penyampaian hal tersebut dalam kata lain, produktivitas pegawai pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung berjalannya pekerjaan menjadi lebih dinamis dan efisien dalam mendorong pencapaian SDGs. Selain itu, untuk mendukung dan meningkatkan produktivitas pegawai membutuhkan tempat yang sesuai dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Menurut Gie (2007), pengaturan ruang kantor merupakan salah satu faktor penting yang mendukung kelancaran aktivitas dalam melaksanakan tata usaha. Oleh karena itu, pentingnya diterapkan penataan ruang kantor yang tepat di instansi pemerintah. Dalam artikel "*Penerapan Konsep Coworking Space Untuk Gedung Kantor Pemerintahan*" yang dipublikasikan oleh Balai Diklat Keuangan Denpasar, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) terutama yang berupa gedung-gedung kantor pemerintahan dengan menerapkan konsep ruang kerja terbuka atau *coworking space*. Konsep ini akan memperlambat hubungan antara pegawai menjadi lebih dekat sehingga kerja sama di antara pegawai semakin meningkat.

Berdasarkan observasi lapangan pada kantor Bappeda Kota Sukabumi, ditemukan beberapa permasalahan dalam lingkup interior yang menghambat aktivitas para pegawai. Permasalahan pertama ini terkait dengan tata letak furniture yang kurang tepat pada beberapa ruangan seperti peletakkan meja dan kursi yang arahnya tidak jelas sehingga seringkali menghalangi alur sirkulasi pegawai dalam melakukan pekerjaan, serta adanya penumpukan berkas-berkas di meja kerja maupun lantai pada beberapa ruangan karena kurangnya tempat penyimpanan, sehingga menciptakan kesan berantakan. Berikutnya permasalahan terkait konsep visual, yaitu penggunaan warna-warna mencolok

yang dijadikan sebagai “identitas” pada ruang hanya terdapat pada ruang Kepala Bidang yang berada dalam ruang Bidang. Hal ini kurang efektif karena ruang Kepala Bidang merupakan area privat yang tidak dapat dilihat oleh umum, sehingga “identitas” yang dimaksud kurang sesuai. Kemudian kurangnya fasilitas yang memadai dan menunjang kebutuhan para pegawai, seperti tidak adanya ruang istirahat, area percetakan dan pantry. Selain itu, sistem keamanan yang ada di kantor ini juga belum memenuhi standar karena kantor ini hanya memiliki sistem keamanan berupa CCTV saja.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang dijabarkan diatas, maka diperlukannya perancangan ulang pada interior kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan menggunakan pendekatan aktivitas. Perancangan ulang ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja kantor yang lebih baik dan efisien agar terbentuknya interaksi kerja yang baik antar pegawai, serta meningkatkan produktivitas pegawai dalam mendukung aktivitasnya dengan pengoptimalan pelaksanaan SDGs.

## **METODE PENELITIAN**

Tahapan metode perancangan yang digunakan dalam perancangan ulang pada interior kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah menggunakan metode pengumpulan data yang mencakup data primer dan data sekunder, serta metode analisis data.

### **Tahapan Pengumpulan Data Primer**

#### **Observasi**

Observasi dilakukan dengan mengamati objek secara langsung dan rinci untuk memperoleh data yang diperlukan terkait dengan objek tersebut. Objek yang diamati dalam observasi harus merupakan objek yang nyata sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

## **Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan agar dapat menyediakan dokumen dengan bukti yang akurat. Penulis melakukan kegiatan dokumentasi di seluruh bangunan mulai dari keadaan interior hingga eksterior bangunan. Sehingga mendapatkan bukti-bukti yang akurat untuk dilanjutkan ke proses analisa bangunan ruang kantor Bappeda Kota Sukabumi.

## **Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang data-data berupa aktivitas, fasilitas serta kelebihan maupun kekurangan yang akan mendukung perencanaan perancangan. Wawancara dilakukan dengan Ibu Ika selaku Kepala Subbagian Umum. Wawancara berlangsung selama 15 menit, yang berisikan tentang latar belakang kantor Bappeda Kota Sukabumi, fasilitas yang ada di kantor Bappeda Kota Sukabumi, hal-hal yang berkaitan dengan bangunan kantor Bappeda Kota Sukabumi, dan aktivitas pegawai pada ruang.

## **Tahapan Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan memanfaatkan literatur yang diperoleh melalui buku-buku dan standar kantor menurut para ahli dan peraturan Menteri, serta dengan merujuk pada hasil studi banding dan studi preseden.

## **HASIL DAN DISKUSI**

Berdasarkan pengumpulan dan analisis data, ditemukan 4 permasalahan utama pada objek perancangan kantor Bappeda Kota Sukabumi, yaitu permasalahan terkait furniture, konsep visual, fasilitas, dan persyaratan umum ruang yang belum memenuhi standar. Keempat permasalahan ini memiliki poin masalah yang sama, yakni terkait terhambatnya aktivitas dan produktivitas pegawai.

Permasalahan tersebut diatasi dengan penerapan pendekatan aktivitas pada perancangan ulang interior kantor Bappeda Kota Sukabumi, dengan menganalisis aktivitas serta kebutuhan pengguna di kantor. Pendekatan aktivitas merupakan metode untuk menciptakan sebuah ruang di mana pengunjung dan pengguna merasakan kenyamanan baik dari besaran luas, luas ruang dan kenyamanan termal dengan melakukan pengelompokan aktivitas yang saling berhubungan sehingga dapat terfasilitasinya kebutuhan pengguna ruang yang dapat menunjang.

### Tema dan Konsep Perancangan



Gambar 1. Mind Mapping Tema dan Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

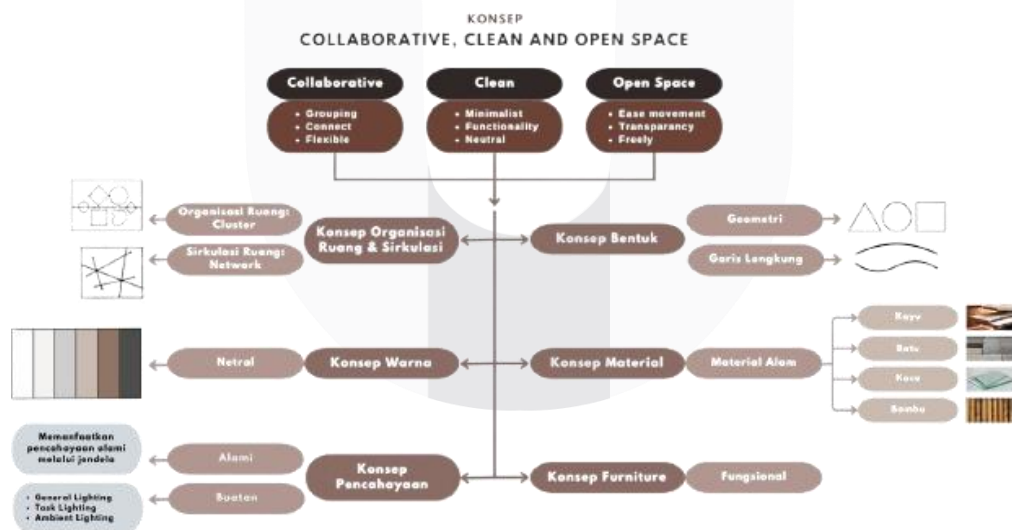
Tema yang diambil untuk perancangan ulang interior kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah *“Ease Movement”*, yang artinya kemudahan dalam bergerak. Tema ini diambil dari urgensi perancangan yang membutuhkan ruang gerak yang baik, serta diambil berdasarkan fenomena yang terjadi terkait dengan penyelenggaraan SDGs dan penerapan *Coworking Space* pada instansi pemerintah. Penerapan tema ini akan menghasilkan kemudahan dalam ruang gerak pada kantor Bappeda Kota Sukabumi dengan menerapkan konsep *Open*

Space dan ruang kerja modern dalam mendukung penyelenggaraan SDGs di lingkup pemerintahan.

Tema ini menghasilkan konsep “*Collaborative, Clean and Open Space*”. Tema dan konsep ini menghasilkan pengayaan, yaitu Modern Minimalis. Penerapan pengayaan ini merupakan pemilihan gaya minimalis yang tidak berlebihan tetapi mengutamakan fungsionalitas dengan pemilihan furniture yang sederhana dan menekankan unsur kenyamanan, dan didukung dengan gaya modern. Sehingga dari ketiga nya ini dapat disimpulkan konsep perancangan yang akan diterapkan pada kantor Bappeda Kota Sukabumi ini adalah *Open Space* dan Modern Minimalis, yang akan berfokus pada penataan ruang dan elemen interior serta visualisasi ruang kantor.

Berikut ini adalah mindmap untuk tema dan konsep perancangan ulang interior kantor Bappeda Kota Sukabumi:

### Konsep Implementasi Perancangan



Gambar 2. Mind Mapping Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Konsep yang diambil untuk perancangan ulang Kantor Bappeda Kota Sukabumi adalah “*Collaborative, Clean and Open Space*”, yang artinya “Kolaborasi, Bersih dan Ruang Terbuka”. Konsep ini dihasilkan dari tema perancangan “*Ease*

*Movement*” yang artinya kemudahan dalam bergerak, dalam hal ini dibutuhkan ruang yang luas dan sirkulasi yang baik guna mendukung pergerakan pengguna ruang. *Collaborative* dalam hal ini yaitu berkelompok, *Clean* dalam artian tentang menciptakan ruang yang bebas dari kekacauan dan gangguan, dan *Open Space* berarti ruang terbuka yang memudahkan pergerakan dan interaksi. Dalam hal ini konsep yang dimaksud adalah kebutuhan ruang yang memaksimalkan kolaborasi pengguna dan aktivitasnya yang diterapkan pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi. Konsep ini diambil berdasarkan tema dan permasalahan yang ada pada kantor dengan permasalahan utama nya terkait aktivitas dan kenyamanan, sehingga konsep ini sesuai untuk diterapkan pada perancangan.

### Konsep Suasana Interior



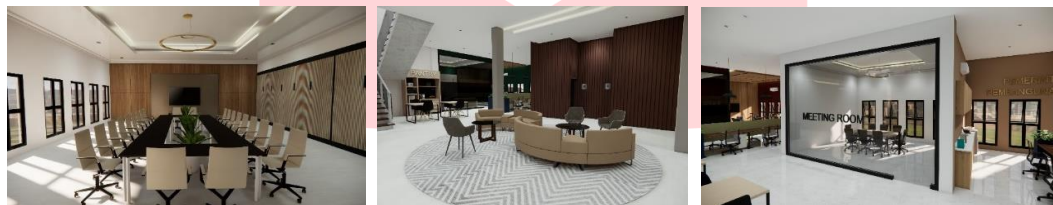
Gambar 3. Mind Mapping Konsep Suasana Interior  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Konsep “*Collaborative, Clean and Open Space*” diharapkan mampu menjadi penyelesaian untuk masalah yang terdapat pada kantor. Konsep ini menciptakan suasana yang berbeda terlebih pada instansi pemerintah, yang mana pada umumnya sebuah kantor terutama kantor pemerintah memiliki suasana yang formal dan monoton, namun dengan penerapan konsep yang baru ini akan menghadirkan suasana baru yang lebih *fresh* dan modern.

Dengan penerapan konsep *Collaborative* yang dapat dijabarkan antara lain: *Grouping, Connect, dan Flexible*, yang diharapkan mampu menciptakan kantor yang dapat mengelompokkan ruang sesuai fungsi dan aktivitas pengguna



nya berdasarkan kedekatan hubungan ruang. Penerapan konsep *Clean* yang dapat dijabarkan antara lain: *Minimalist*, *Functionality*, dan *Neutral*, yang diharapkan mampu menciptakan kantor yang bersih dalam artian penggunaan bentuk, material dan furniture yang sederhana dan fungsional, serta penggunaan warna-warna yang netral. Dan penerapan konsep *Open Space* yang dapat dijabarkan antara lain: *Ease of Movement*, *Transparency*, dan *Freely*, dan diharapkan mampu menciptakan ruang gerak yang baik dan transparan sehingga menghasilkan kemudahan.



Gambar 4. Suasana Tema dan Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

## Konsep Visual

### Warna



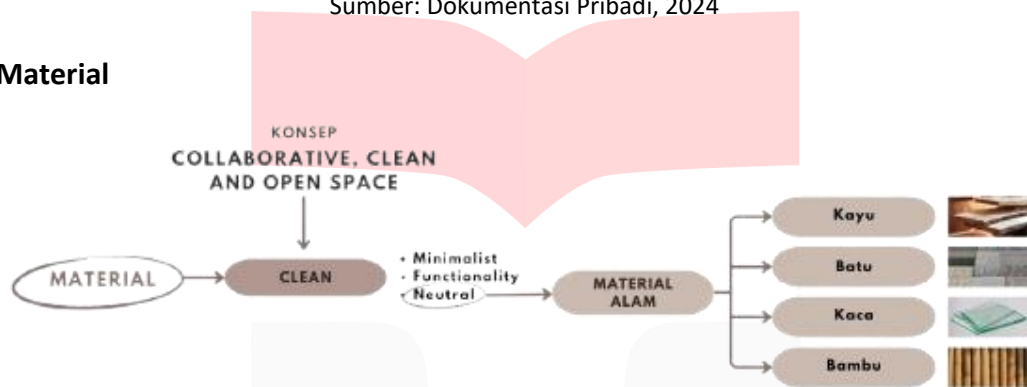
Gambar 5. Mind Mapping Konsep Warna Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Warna yang akan diterapkan diambil dari konsep *Clean* dengan penjabarannya yaitu netral. Penerapan warna-warna netral ini dengan banyak menggunakan warna putih, abu-abu, dan warna krem. Warna-warna netral ini menciptakan rasa tenang dan kesederhaan serta kesan modern. Penerapan warna putih diaplikasikan pada elemen interior seperti dinding, kolom dan ceiling di area publik seperti lobby, aula dan koridor. Warna abu-abu, krem dan coklat dari material kayu akan banyak diterapkan pada lantai, furniture dan elemen dekorasi.



Gambar 6. Suasana Tema dan Konsep Perancangan  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

## Material



Gambar 7. Mind Mapping Konsep Material Perancangan  
 Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

Material yang akan dipakai adalah material lokal yang berasal dari bahan alami seperti kayu, batu, kaca dan bambu. Elemen desain interior yang terintegrasi dengan lingkungan dan material lokal dapat menciptakan identitas budaya yang kuat dan relevansi praktis (Maulana, 2024). Material ini diambil dari konsep *Clean* yang penjabarannya yaitu netral, sehingga penggunaan material yang natural ini selaras dengan konsep yang akan diterapkan. Material alami ini pun mendukung konsep minimalism yang diterapkan, dengan banyak menggunakan material kayu sehingga menciptakan kesan yang hangat dan suasana yang nyaman.



Gambar 8. Suasana Tema dan Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

## Konsep Persyaratan Umum Ruang

### Pencahayaan

Konsep pencahayaan akan memanfaatkan pencahayaan alami melalui jendela yang pada bangunan eksisting sudah ada, dengan bentuk jendela yang besar dan tinggi hingga ke ceiling dan jumlah yang banyak ini akan sangat mendukung penerapan konsep pengayaan Modern Minimalis. Karena konsep minimalis sendiri lebih banyak memanfaatkan pencahayaan alami. Pencahayaan buatan yang akan digunakan diantaranya: *General lighting*, *Task lighting*, dan *Ambient lighting*.



Gambar 9. Suasana Tema dan Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

### Penghawaan

Konsep penghawaan terdiri dari penghawaan alami dan buatan. Konsep penghawaan alami akan memanfaatkan bukaan jendela dan pintu koridor, sedangkan penghawaan buatan akan menggunakan *Air Conditioning* (AC).



Gambar 10. Suasana Tema dan Konsep Perancangan  
Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024

### **Keamanan**

Konsep keamanan menerapkan sistem keamanan perangkat CCTV, sistem keamanan aktif seperti APAR, Hydrant, fire alarm, dan smoke detector yang diletakkan di area yang terlihat dan mudah dijangkau untuk memudahkan pengguna mencari dan menggunakan jika terjadi hal yang tidak terduga. Adapun sistem keamanan pasif seperti jalur evakuasi, dan petunjuk arah.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari perancangan ulang interior kantor Bappeda Kota Sukabumi yang dilakukan dengan pendekatan aktivitas yang mengacu pada data observasi lapangan dan literatur pendukung lainnya, dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan utama terkait terhambatnya aktivitas gerak pegawai. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yaitu tata letak furniture, penerapan konsep visual, kelengkapan fasilitas untuk pengguna ruang, dan kelengkapan sistem keamanan dan keselamatan. Berikut merupakan kesimpulan dari hasil perancangan ulang:

1. Penataan tata letak furniture sangat penting agar pengguna ruang dapat melakukan aktivitasnya dengan nyaman dan mendapatkan kemudahan dalam bergerak. Permasalahan terkait tata letak furniture pada kantor Bappeda Kota Sukabumi ini yaitu mengenai tata letak furniture yang kurang tepat pada beberapa ruangan yang membuat seringkali menghalangi alur sirkulasi pegawai, serta kurangnya tempat penyimpanan sehingga adanya penumpukkan berkas-berkas di meja kerja maupun lantai yang membuat ruang memiliki kesan yang berantakan. Dengan perancangan ulang ini, bertujuan untuk memperbaiki penataan furniture yang lebih baik sehingga dapat menciptakan alur sirkulasi pegawai yang lebih baik juga. Untuk memaksimalkan tujuan yang akan dicapai, perancangan ulang ini diterapkan dengan pendekatan aktivitas untuk menyelesaikan permasalahan yang berdampak pada aktivitas di kantor.
2. Penerapan konsep visual yang sesuai sangat penting bagi kantor pemerintah, karena dengan penggunaan warna, bentuk dan material sangat mempengaruhi identitas kantor maupun psikis pengguna ruang. Permasalahan terkait konsep visual pada kantor Bappeda Kota Sukabumi ini yaitu mengenai penggunaan warna-warna yang dijadikan sebagai identitas ruang namun belum sesuai, karena penggunaan warna-warna tersebut hanya terdapat di dalam ruang Kepala Bidang yang berada di dalam ruang Bidang, yang mana ruang Kepala Bidang merupakan ruang privat dan tidak dapat dilihat oleh umum, sehingga identitas yang dimaksud kurang tepat. Solusi desain yang diterapkan dari permasalahan tersebut yaitu menggunakan konsep visual berupa warna pada setiap ruang per divisi/bidang, serta diberi *sign* nama ruang divisi/bidang tersebut, dan ruang tersebut dibuat *open space* sehingga dapat dilihat secara umum. Hal tersebut membuat konsep visual dengan penggunaan warna pada ruang dapat dijadikan "identitas" yang sesuai dan tepat.

3. Kelengkapan fasilitas pada sebuah kantor sangat penting, karena fasilitas kantor merupakan penunjang bagi kebutuhan para pegawai yang dapat meningkatkan produktivitas pegawai kantor. Permasalahan terkait fasilitas pada kantor Bappeda Kota Sukabumi ini yaitu kurangnya fasilitas yang memadai dan menunjang kebutuhan para pegawai, seperti tidak adanya ruang istirahat, area percetakan dan pantry. Solusi desain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menambahkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, seperti membuat area ruang istirahat berupa kursi duduk dan sofa yang nyaman pada setiap ruang divisi/bidang sehingga setiap pegawai dengan divisi/bidang tertentu untuk istirahatnya tidak perlu terlalu jauh dengan ruang kerjanya, lalu membuat area percetakan pada setiap ruang divisi/bidang sehingga setiap ruang memiliki area percetakan sendiri sehingga tidak akan ada antrian maupun mengganggu divisi/bidang lainnya, dan membuat area pantry khusus di setiap lantai, pantry umum terdapat di lantai 2 dengan luas yang cukup besar karena sebagian besar pegawai divisi/bidang terdapat di lantai 2, untuk Kepala Bappeda memiliki pantry sendiri pada ruang kerjanya. Solusi yang dihadirkan ini dapat melengkapi fasilitas yang memadai dan menunjang kebutuhan para pengguna ruang yaitu baik pegawai maupun tamu.
4. Kelengkapan sistem keamanan dan keselamatan pada sebuah kantor sangat penting, karena adanya sistem keamanan dan keselamatan dapat memberikan keamanan yang tinggi pada pengguna ruang tersebut. Permasalahan terkait sistem keamanan dan keselamatan pada Kantor Bappeda Kota Sukabumi ini yaitu kantor ini hanya memiliki CCTV saja sebagai sistem keamanannya sehingga hal ini belum sesuai dengan standar sistem keamanan pada gedung perkantoran. Solusi desain yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan

melengkapi kekurangannya, seperti menambahkan sistem keamanan berupa sprinkler, APAR, dan smoke detector. Untuk sistem keselamatan, menambahkan jalur evakuasi dan pintu darurat. Dengan dilengkapinya sistem keamanan dan keselamatan ini akan membuat para pengguna ruang merasa aman dan nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Day, S. A., Sarihati, T., & Liritantri, W. (2024). Redesain Kantor Plaza Summarecon Serpong. *e-Proceeding of Art & Design*, 2340.
- Ernst, N. (2002). *Architect Data 2nd*.
- Maulana, T. A. (2024). Elemen Tradisional dalam Desain Interior: Pengaruh Tata Letak dan Fungsi dalam Rumah Adat Miduana. *Jurnal Ideas*, 923.
- Novanta, N. M. (2018). Duties and Powers of The Department of Public Works and Spatial Planning in The Implementation of Road in Kendal. *Jurnal Daulat Hukum*, 788.
- Pancalaksana, R. D., Asharsinyo, D. F., & Akhmadi. (2023). Perancangan Ulang Interior Kantor PUPR (Bale Wiwitan) Kota Tasikmalaya Dengan Pendekatan Aktivitas dan Perilaku. *e-Proceeding of Art & Design*, 5187.
- Raharjo, M. A., & Sabur, F. (2020). Perancangan System Smart Office Berbasis Internet of Things Politeknik Penerbangan Makassar. *Jurnal Teknik dan Keselamatan Transportasi*, 142.
- Sari, M. R., Hanafiah, U. I., & Zahra, M. F. (2022). Perancangan Ulang Kantor Teknologi Informasi Dengan Pendekatan Aktivitas, Provinsi Aceh. *Jurnal Arsitektur Zonasi*, 334.
- Trisiana, A., Hanafiah, U. I., & Sarihati, T. (2018). Pemanfaatan Konsep Space Within a Space dalam Pengolahan Layout pada Interior. *Jurnal Idealog*, 2.

- Widyanto, M. A., Gunawan, A. N., & Rusyda, H. F. (2024). Perancangan Ulang Interior Pada Ruang Perkantoran Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Sumedang dengan Pendekatan Aktivitas dan Perilaku. *e-Proceeding of Art & Design*, 1964.
- Yunisa, R., & Martono, S. (2018). Analisis Pemahaman Pegawai Tentang Pekerjaan Kantor. *Economic Education Analysis Journal*, 364.

